



## RESEARCH ARTICLE

# Jejak yang Terlupakan: Keraton Kartasura dalam Perspektif Politik Identitas dan Memori Kolektif Masyarakat

## *Forgotten Traces: Kartasura Palace from the Perspective of Identity Politics and Collective Memory of Society*

Rahmania Yoga Ratri\*, Anisa Fitri Rohimah, Nurul Chotimah, Reska Nurviani, Salsabilla Diana Putri

**Abstract:** The Kartasura Palace represents a significant legacy of the Mataram Islamic Kingdom, yet it has gradually faded from the collective memory of society. This study aims to examine the position of the Kartasura Palace not only as a historical site but also as a symbol of political identity and collective memory among Javanese communities. Using a qualitative approach and a descriptive-narrative method, data were collected through in-depth interviews, direct observation, and historical literature review. The findings reveal that the low level of public knowledge—especially among younger generations—about the history of Kartasura Palace is influenced by the dominance of the Surakarta Palace narrative and the weakness of local history education. The site is often perceived more mystically than historically, weakening the community's sense of collective identity. However, local communities and site managers have initiated preservation efforts that could revive Kartasura's historical and cultural values. The Kartasura Palace holds great potential as a space for cultural representation and historical learning to strengthen both local and national identity awareness. This study recommends enhancing local history education, fostering cultural preservation collaboration between government and society, and symbolically revitalizing the site as a strategy to reinforce an inclusive and sustainable political identity.

**Keywords:** Kartasura Palace, Political Identity, Collective Memory.

**Abstrak:** Keraton Kartasura merupakan bagian penting dalam sejarah Kesultanan Mataram Islam yang kini mengalami pelunturan dalam memori kolektif masyarakat. Penelitian ini bertujuan menelaah posisi Keraton Kartasura tidak hanya sebagai situs historis, tetapi juga sebagai simbol politik identitas dan memori kolektif masyarakat Jawa. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif naratif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta telaah literatur sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat lokal, terutama generasi muda, terhadap sejarah Keraton Kartasura disebabkan oleh dominasi narasi Kesunanan Surakarta dan lemahnya pendidikan sejarah lokal. Situs ini cenderung dipersepsikan secara mistis daripada historis, sehingga melemahkan keterikatan identitas kolektif masyarakat. Namun, terdapat inisiatif pelestarian dari komunitas lokal dan pengelola situs yang berpotensi menghidupkan kembali nilai historis dan budaya Kartasura. Keraton Kartasura memiliki potensi besar sebagai ruang representasi budaya dan pembelajaran sejarah yang dapat memperkuat kesadaran identitas lokal maupun nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi sejarah lokal, kolaborasi pelestarian budaya antara pemerintah dan masyarakat, serta revitalisasi simbolik situs sebagai strategi memperkuat politik identitas yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Keraton Kartasura, Politik Identitas, Memori Kolektif.

### About Author

Rahmania Yoga Ratri, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia; Anisa Fitri Rohimah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia; Nurul Chotimah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia; Reska Nurviani, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia; Salsabilla Diana Putri, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

**To cite this article:** Ratri, R. Y. ., Rohimah, A. F. ., Chotimah, N. ., Nurviani, R. ., & Putri, S. D. . (2025). Jejak yang Terlupakan: Keraton Kartasura dalam Perspektif Politik Identitas dan Memori Kolektif Masyarakat. *Dampeng: Journal of Art, Heritage and Culture*, 1(3), 192–202. <https://doi.org/10.70742/dampeng.v1i3.415>

Received: October 21, 2025

Accepted: November 10, 2025

Published: November 16, 2025

### \*Corresponding author:

Rahmania Yoga Ratri  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
E-mail: [rahmaniayr3@gmail.com](mailto:rahmaniayr3@gmail.com)



## Pendahuluan

Kartasura merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang telah berusia 344 tahun dan berkembang sebagai salah satu kawasan bersejarah di Indonesia. Keistimewaan wilayah ini terletak pada keberadaan situs Cagar Budaya Keraton Kartasura, yang pernah menjadi pusat pemerintahan Mataram Islam sebelum akhirnya berpindah ke Surakarta (Qurniawati, 2024). Namun, meskipun memiliki nilai sejarah tinggi, eksistensi Keraton Kartasura semakin terlupakan. Saat ini, bangunan utama keraton sudah tidak ada, hanya tersisa petilasan dan beberapa struktur pendukung di dalam kompleks keraton yang masih dihuni warga. Padahal, situs ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan dilindungi oleh undang-undang.

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sejarah Keraton Kartasura menunjukkan adanya krisis dalam transmisi memori kolektif. Dalam wawancara dengan salah satu warga lokal, diketahui bahwa banyak generasi muda bahkan belum pernah mengunjungi lokasi tersebut karena dianggap tidak menarik atau tidak penting (Lesmana, 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Koesninda (2020) menunjukkan bahwa Keraton Kartasura memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan budaya dan edukatif, namun pengelolaannya belum optimal karena minimnya perhatian dari pemerintah dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya krisis dalam pewarisan memori sejarah dan identitas kolektif. Di sisi lain, situs ini justru menyimpan muatan politik identitas penting yang dapat ditelusuri melalui dinamika kekuasaan pasca-perpindahan pusat kerajaan dari Kartasura ke Surakarta, serta narasi sejarah yang dikonstruksi secara hegemonik oleh elit politik dan kebudayaan (Koesninda, 2020).

Dalam pendekatan teori memori kolektif ala Maurice Halbwachs menyatakan bahwa memori kolektif bukanlah sesuatu yang terbentuk secara individual, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang melibatkan kelompok sosial dalam proses pembentukan dan pemeliharaan ingatan tentang masa lalu. Ingatan ini hidup dalam bingkai nilai, simbol, dan praktik sosial yang terus direproduksi dalam ruang sosial tertentu (Wahyu & Sukirno, 2025). Sementara politik identitas dapat digunakan untuk memahami bagaimana narasi-narasi sejarah diproduksi untuk kepentingan legitimasi kekuasaan dan simbol kebudayaan, seperti yang terjadi pada dominasi simbolik Keraton Yogyakarta dan Surakarta dibanding Kartasura.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti dinamika sejarah dan sosial yang berkaitan dengan situs Keraton Kartasura. (Rosanawati, 2020) dalam penelitiannya tentang Konflik Internal dan Perpindahan Keraton Kartasura ke Sala menjelaskan bahwa perpindahan pusat kerajaan tidak hanya dipicu oleh konflik politik di lingkungan istana, tetapi juga mencerminkan perubahan simbol kekuasaan dan legitimasi politik yang melemahkan posisi Kartasura sebagai pusat pemerintahan. Hal senada juga diungkapkan oleh (Abdul & Sumarlam, 2022) dalam kajiannya Analisis Wacana Kritis Teks Berita "Penjebolan Tembok Bekas Keraton Kartasura", yang menyoroti bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap situs bersejarah tersebut. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan lebih menonjolkan aspek konflik dibandingkan pelestarian, sehingga turut memengaruhi cara masyarakat memaknai situs ini dalam kerangka memori kolektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi Keraton Kartasura dari perspektif politik identitas dan memori kolektif masyarakat. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode studi literatur serta wawancara mendalam terhadap masyarakat sekitar dan pengurus situs (juru kunci). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada aspek sejarah, tetapi juga menelaah bagaimana narasi dan simbol keraton dikonstruksi, diabaikan, atau bahkan dihapuskan dalam konteks kekuasaan dan identitas budaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keraton Kartasura merupakan representasi dari sejarah yang sengaja dikesampingkan dalam narasi besar budaya Jawa. Keberadaannya

yang tidak terintegrasi dalam arus utama simbol kebudayaan Jawa modern menjadi cerminan dari politik identitas yang eksklusif dan selektif. Selain itu, lemahnya dokumentasi dan pewarisan nilai-nilai sejarah menyebabkan masyarakat kehilangan hubungan emosional dengan situs tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mendorong revitalisasi Keraton Kartasura baik sebagai warisan sejarah maupun sebagai simbol kebudayaan lokal yang inklusif.

## **Metode**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif naratif dan pendekatan historis untuk menelusuri jejak sejarah, politik identitas, dan memori kolektif masyarakat terkait Keraton Kartasura. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola keraton, warga sekitar, dan generasi muda, serta observasi langsung di Keraton Kartasura untuk menangkap kondisi fisik dan interaksi sosial masyarakat. Selain itu, digunakan pula data pendukung yang berasal dari studi pustaka berupa buku, artikel ilmiah, dan dokumen sejarah sebagai data sekunder. Setelah data terkumpul, dilakukan reduksi data dengan cara menyaring informasi yang relevan sesuai dengan topik penelitian, kemudian data tersebut dikodekan menurut kategori tertentu untuk memudahkan pengelompokan dan identifikasi pola. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan. Keabsahan data juga dijaga dengan cara membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan kepustakaan, serta memeriksa ulang data kepada informan. Seluruh proses dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, mendalam, dan kontekstual tentang peran Keraton Kartasura sebagai bagian penting sejarah dan identitas budaya masyarakat Jawa.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sejarah Keraton Kartasura dan Peranannya dalam Dinamika Mataram Islam**

Keraton Kartasura didirikan pada tahun 1680 oleh Amangkurat II sebagai pusat pemerintahan baru Kesultanan Mataram Islam. Latar belakang pendirian keraton ini tidak terlepas dari krisis politik dan militer yang melanda Mataram pada akhir abad ke-17. Sebelumnya, pusat kekuasaan Mataram berada di Keraton Plered, yang dibangun oleh Amangkurat I. Namun, pada masa pemerintahan Amangkurat I, terjadi pemberontakan besar yang dikenal dengan Pemberontakan Trunajaya (1674–1681). Pemberontakan ini dipimpin oleh Trunajaya, seorang bangsawan Madura, yang didukung oleh Pangeran Puger, putra Amangkurat I yang bersaing memperebutkan tahta. Akibat pemberontakan tersebut, Plered jatuh ke tangan pemberontak dan banyak bagian istana serta kota hancur. Amangkurat I dan Amangkurat II yang saat itu masih Adipati Anom terpaksa melarikan diri ke wilayah barat untuk menghindari bahaya (Agrestiwana & Indrawati, 2023).

Setelah Amangkurat I wafat dalam pengasingan, Amangkurat II kembali berusaha merebut kembali kekuasaan dengan bantuan VOC (Perusahaan Hindia Timur Belanda) yang saat itu mulai berperan besar dalam politik Jawa. Karena Plered sudah tidak aman dan dianggap telah kehilangan kesakralan sebagai pusat kerajaan, Amangkurat II memutuskan membangun pusat pemerintahan baru di Kartasura, yang terletak di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Kartasura dipilih karena letaknya yang strategis dan dianggap lebih aman dari ancaman pemberontakan. Pendirian keraton ini juga merupakan upaya untuk memulai era baru dalam pemerintahan Mataram yang tengah mengalami krisis dan konflik internal yang berkepanjangan (Puspitasari, 2025). Sejak awal, dinamika kekuasaan di Kartasura sarat dengan pertarungan politik dan identitas. Legitimasi kekuasaan Jawa dibangun melalui simbol-simbol budaya seperti keraton, ritual, dan pusaka yang berfungsi tidak hanya secara

spiritual, tetapi juga politis (Astuti, 2023). Pergantian lokasi keraton bukan sekadar keputusan administratif, melainkan bagian dari upaya rekonstruksi identitas politik dan spiritual kerajaan.

Salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah awal Kartasura adalah Pemberontakan Trunajaya (1674–1681). Trunajaya, seorang bangsawan Madura yang memberontak terhadap kekuasaan Mataram, berhasil mengguncang pusat pemerintahan di Plered. Amangkurat I melarikan diri dan meninggal dalam pelarian, sementara putranya, Amangkurat II, mendirikan keraton baru di Kartasura. Namun, untuk mengatasi krisis ini, Amangkurat II harus meminta bantuan militer dari VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), yang menandai awal dari keterlibatan asing dalam urusan dalam negeri Mataram. Masa pemerintahan di Kartasura tidak pernah benar-benar tenang. Setelah Trunajaya, muncul berbagai perang saudara dan perebutan takhta di antara para pewaris dan bangsawan istana. Amangkurat II, Amangkurat III, hingga Pakubuwana I terlibat dalam konflik yang melemahkan kestabilan pemerintahan (Khoirunisa et al., 2024). Perebutan kekuasaan tidak hanya menguras sumber daya kerajaan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian politik yang terus-menerus. Rakyat menjadi korban, dan pengaruh kerajaan di luar keraton pun makin memudar. Kekacauan mencapai puncaknya dalam Geger Pecinan (1740–1743), sebuah pemberontakan besar yang melibatkan masyarakat Tionghoa dan sebagian kelompok Jawa yang tidak puas dengan pemerintahan. Raden Mas Garendi, atau Sunan Kuning, menjadi tokoh utama pemberontakan ini. Ia bahkan sempat diangkat sebagai raja oleh para pemberontak setelah Kartasura berhasil direbut. Pakubuwana II, yang sebelumnya mendukung pemberontakan, kemudian berpihak kepada VOC demi merebut kembali tahtanya. Keraton Kartasura hancur, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara simbolik ia kehilangan kesakralannya sebagai pusat pemerintahan Mataram (Gritantin, 2024).



**Gambar 1.** *Keraton Kartasura*

Intervensi VOC dalam mengatasi pemberontakan memberikan dampak besar. Meskipun VOC membantu Pakubuwana II kembali berkuasa, mereka menuntut imbalan dalam bentuk pengaruh politik dan kendali atas wilayah kerajaan. Ini menandai semakin kuatnya dominasi asing di tanah Jawa, dan kedaulatan Mataram semakin menipis. Setelah pemberontakan dan kerusakan besar itu, Pakubuwana II merasa bahwa Kartasura tidak lagi layak menjadi pusat kekuasaan. Dalam tradisi Jawa, keraton yang telah direbut dan dinodai dianggap kehilangan wahyu atau legitimasi spiritual. Oleh karena itu, pada tahun 1745, ia memindahkan pusat kerajaan ke desa Sala yang kemudian dinamai Surakarta Hadiningrat (Lazuardi & Sunjayadi, 2025). Langkah ini bukan sekadar pindah tempat, tetapi juga langkah simbolis untuk meninggalkan masa lalu yang penuh kehancuran dan memulai era baru yang lebih damai dan sakral. Nama "Surakarta" dipilih untuk membawa harapan akan keberanian, kemakmuran, dan ketenangan. Masa Kartasura dalam historiografi Jawa dikenal sebagai periode kacau karena banyaknya perang saudara, intervensi asing yang semakin dalam, serta berbagai pemberontakan yang melemahkan sendi-sendi kekuasaan. Keraton Kartasura

tidak hanya mengalami kerusakan fisik, tapi juga kehilangan martabatnya sebagai simbol kekuasaan raja Jawa. Sejarawan mencatat bahwa selama 68 tahun masa berdirinya, Kartasura hampir tidak pernah berhasil membangun tatanan politik yang stabil. Namun dari kehancuran itulah, Mataram lahir kembali dalam wujud baru: Surakarta dan kemudian Yogyakarta, sebagai dua kerajaan kembar yang menjadi pewaris sejarah Mataram (Mulia & Henny Kustini, 2020).

### **Politik Identitas dan Simbol Budaya Jawa: Posisi Keraton Kartasura**

Sejak era Mataram, politik identitas Jawa berakar kuat melalui pewarisan budaya yang difasilitasi oleh simbol-simbol ritual, arsitektur keraton, dan pusaka, seluruhnya berfungsi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Ritual Garebeg, seperti Garebeg Mulud, Waisak, dan Besar berperan bukan sekadar sebagai perayaan keagamaan, tetapi sebagai panggung politik budaya di mana penguasa memperlihatkan dirinya sebagai penyalur berkah ilahi sekaligus penjaga tradisi Jawa Islam, sehingga memberikan fondasi moral dan spiritual terhadap struktur kekuasaan masyarakat Jawa. Namun, momentous Geger Pecinan pada tahun 1742 menghancurkan keraton Kartasura secara fisik dan spiritual, sehingga kota tersebut kehilangan aura sakralnya dan dianggap “tercemar”. Setelah kehancuran Kartasura akibat Geger Pecinan, ruang tersebut dianggap “tidak suci” lagi dan kehilangan wahyu kerajaan. Perpindahan ke Surakarta bukan hanya tindakan pragmatis, tetapi juga strategi rekonstruksi simbolik untuk menegaskan ulang identitas budaya Jawa (Qurniawati, 2024).

Politik identitas muncul dari kesadaran kelompok akan keunikan dan legitimasi simboliknya (Nasrudin, 2018). Atas latar itu, Bapak Suryo Leksmanselaku narasumber yang kami wawancarai mengafirmasi bahwa lebih lanjut bahwa hal ini tampak dalam tindakan Pakubuwana II yang memindahkan pusat pemerintahan Mataram ke Desa Sala yang kemudian dikenal sebagai Surakarta Hadiningrat dengan tata ruang kosmologis dan ritual baru, sementara Kartasura ditinggalkan sebagai “bekas pusat” yang tidak lagi memiliki otoritas. Akibatnya, dua pusat baru Surakarta dan Yogyakarta mendapatkan ruang utama dalam narasi sejarah Jawa, sementara Kartasura mengalami marginalisasi kultural. Fenomena ini menunjukkan bagaimana politik identitas bersifat hegemonik: sebagian narasi diperkuat, sementara yang lain dilupakan (Astuti, 2023).

Nasib serupa juga terjadi di Yogyakarta setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Kesultanan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono I secara cepat mengambil alih pusaka, ritual, gamelan, dan jaringan intelektual Jawa Islam. Keraton Yogyakarta lalu diposisikan sebagai pusat budaya modern: multireligi, akademik, hingga sebagai daya tarik wisata mempertegas legitimasi sang Sultan sebagai pemimpin budaya sekaligus agama (Kartini, 2020). Di sana, elemen-elemen budaya seperti arsitektur keraton, gamelan, batik terutama motif Sidomulyo dan Sekar Jagad maupun praktik filologi juga berfungsi sebagai simbol kekuasaan kultural dan spiritual (Prasetyo, 2020). “setelah perpindahan kekuasaan itu dan menjadi Keraton Surakarta serta Kesultanan Yogyakarta perbedaan secara singkatnya adalah keraton Surakarta lebih ke pusaknya, sedangkan kesultanan Yogyakarta lebih ke budayanya.” Ujar beliau.

Sementara itu, Kartasura tidak dipulihkan sebagai pusat budaya utama. Stigma spiritual dan kerusakan yang pernah terjadi menyebabkan Kartasura hanya difungsikan sebagai situs petilasan dan makam kerabat bangsawan, tanpa ada narasi politik kebudayaan yang hidup dan koheren. Banyak warisan budaya fisik dari Kartasura justru dipindahkan ke Surakarta atau ke museum membuat Kartasura menjadi artefak pasif warisan sejarah, bukan simbol kekuasaan yang aktif dan hidup (Wibowo, 2017).

Dinamika perpindahan pusat budaya ini mencerminkan dua rezim legitimasi yang berbeda. Pertama, rezim tradisional yang berlandaskan pada simbol spiritual, pusaka, dan hierarki kosmis, di mana pusat budaya dapat dipindahkan sebagai alat meneguhkan otoritas.

Kedua, rezim modern yang menempatkan keraton sebagai entitas budaya dan sosial dalam kerangka negara bangsa. Kini, Surakarta dan Yogyakarta memainkan peran ganda: tetap menjaga ritual dan simbol-simbol tradisional, namun juga beradaptasi dalam konteks modern melalui pariwisata, pendidikan budaya, dan diplomasi budaya—meskipun otonomi politiknya telah menyusut (Nugroho, 2021).

### **Memori Kolektif Masyarakat terhadap Keraton Kartasura**

Maurice Halbwachs mengemukakan, bahwa memori kolektif ingatan individu terbentuk dalam kerangka sosial melalui interaksi kelompok (Puspitaningrum, 2022). Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga yang bermukim di sekitar situs Keraton Kartasura, ditemukan bahwa ingatan kolektif terhadap keberadaan keraton ini cukup lemah. Banyak warga yang mengetahui bahwa di daerah tersebut pernah berdiri sebuah keraton, namun tidak memiliki pemahaman yang utuh mengenai peran pentingnya dalam sejarah Jawa. Seorang warga menyatakan bahwa “keraton ini dulunya tempat raja, tapi kemudian rusak karena perang, dan keraton dipindahkan ke Surakarta”. Namun, sepengetahuan beliau tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kronologi sejarah atau peristiwa penting yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa memori kolektif masyarakat setempat lebih didominasi oleh narasi lisan yang turun-temurun, dan minim pengetahuan sejarah formal. Fenomena ini menggambarkan apa yang disebut Halbwachs sebagai “ingatan yang terfragmentasi oleh struktur sosial” (Wahyu & Sukirno, 2025).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan Kraton Kartasura terlupakan dalam ingatan masyarakat adalah karena perpindahan istana Kerajaan Mataram dari Kartasura ke Surakarta, yang menyebabkan keraton Kartasura tidak pernah ditempati lagi dan berbagai konflik internal (Rosanawati, 2020). Warga sekitar menyebut bahwa mereka mendengar cerita turun-temurun dari orang tua atau kakek-nenek mereka bahwa keraton ini “jatuh karena serangan dari orang Cina pada peristiwa Geger Pecinan.” (Sukris, 2025) merujuk pada peristiwa Geger Pecinan 1742. Geger Pecinan merupakan suatu peristiwa sejarah lokal yang terjadi di Kartasura pada tahun 1740-1743 dimana mengakibatkan keraton hancur yang akhirnya dipindahkan ke desa Sala (Solo) dan berubah nama menjadi Surakarta Hadiningrat (Salsabilla & Ramadinata, 2021). Peristiwa tersebut, yang berakhir dengan ditinggalkannya keraton oleh pihak kerajaan, menyebabkan kesan bahwa Kartasura bukan simbol kejayaan, melainkan kegagalan. Selain itu, pemindahan pusat pemerintahan ke Surakarta semakin memperkuat pengabaian terhadap Kartasura dalam narasi besar sejarah Jawa.

Persepsi masyarakat terhadap situs Keraton Kartasura pun beragam. Sebagian menganggapnya tempat bersejarah yang perlu dihormati, sementara sebagian lainnya lebih mengenalnya sebagai lokasi yang angker. Hal ini menyebabkan interaksi masyarakat terhadap situs lebih bersifat mistis daripada historis (Lesmana, 2025). Saat ditanya apakah mereka merasa tahu mengenai situs tersebut “Kalau anak-anak muda ya nggak tahu banyak, nggak pernah diajarin juga di sekolah, paling juga dengar dari cerita orang,” (Devita, 2025) ujar seorang pemuda yang tinggal tidak jauh dari kompleks bekas keraton.

Meski demikian, terdapat inisiatif lokal yang mulai muncul untuk menghidupkan kembali ingatan kolektif tentang situs ini. Sejumlah masyarakat dan pemuda mengaku telah beberapa kali melakukan kerja bakti membersihkan area situs, serta mengadakan acara doa bersama di sekitar benteng sebagai bentuk penghormatan leluhur. Selain itu juga terdapat kegiatan baik di dalam ataupun di sekitar petilasan keraton guna mengingatkan sejarah Kartasura menggandeng bersama Masyarakat, pelajar dan mahasiswa (Lesmana, 2025). Walau masih terbatas dan belum terorganisir secara luas, upaya-upaya ini menunjukkan adanya kesadaran lokal yang perlahan tumbuh untuk merekonstruksi hubungan identitas masyarakat dengan warisan sejarah mereka.

## **Tantangan dan Peluang Pelestarian Keraton Kartasura Sebagai Cagar Budaya**

### **a. Kondisi petilasan Keraton Kartasura saat ini**

Keraton Kartasura pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam dalam kurun waktu yang relatif singkat, yakni sekitar 65 tahun. Meskipun masa kekuasaannya tidak berlangsung lama, keraton ini meninggalkan sejumlah peninggalan historis yang signifikan, termasuk struktur bangunan inti. Seiring dengan tidak difungsikannya lagi Keraton Kartasura sebagai pusat pemerintahan, kondisi fisik bangunan di dalam kompleks keraton maupun kawasan sekitarnya mengalami degradasi secara perlahan hingga akhirnya banyak yang mengalami kerusakan bahkan lenyap seiring berjalannya waktu.

Hingga kini, sisa-sisa peninggalan yang masih dapat dijumpai hanya berupa struktur tembok yang menyerupai tembok baluwarti dengan ketebalan antara 2–3 meter dan ketinggian sekitar 3–4 meter. Kondisi tembok tersebut sangat memprihatinkan karena sebagian besar telah mengalami keretakan dan kerusakan akibat kurangnya pemeliharaan. Selain tembok, terdapat pula elemen arsitektural lainnya yang masih tersisa, seperti bekas bangunan paseban dan masjid peninggalan era Pakubuwono II yang masih berdiri meskipun tidak berada di dalam kompleks utama keraton (Mulia & Henny Kustini, 2020).

Terdapat pula Petilasan peristirahatan raja di Keraton Kartasura berupa dua batu besar yang berada di tengah kompleks. Kemudian ada Pendopo, dahulu pendopo ini berfungsi sebagai tempat rapat kerajaan, sedangkan kini dimanfaatkan masyarakat setempat untuk kegiatan seremonial dan acara penting lainnya. Dua alun-alun yang dahulunya menjadi bagian dari Keraton Kartasura, masing-masing terletak di sisi utara dan selatan, saat ini sebagian besar lahannya telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman penduduk. Sementara itu, area bekas kompleks keraton kini banyak dimanfaatkan sebagai lahan pemakaman, baik bagi keluarga Kasunanan maupun masyarakat umum. Namun sejak tahun 2005, otoritas Keraton Kasunanan telah menghentikan penggunaan area tersebut sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat umum.

Pemeliharaan dan penjagaan Keraton Kartasura sehari-harinya dilakukan oleh seorang pengelola sekaligus juru kunci bernama Bapak Surya Lesmana. Beliau merupakan keturunan langsung yang secara turun-temurun telah mengemban tanggung jawab merawat kompleks keraton tersebut. Jabatan juru kunci diwariskan secara generasional sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keaslian nilai historis dan kultural yang melekat pada tanah peninggalan Keraton Kartasura. Tempat tinggal Bapak Surya terletak tidak jauh dari kawasan keraton, tepatnya di bagian selatan kompleks. Keraton ini terbuka untuk dikunjungi kapan saja, dan dalam setiap kunjungan, sang juru kunci dengan senang hati menyampaikan kisah sejarah serta silsilah tokoh-tokoh keluarga kerajaan kepada para pengunjung yang datang (Lesmana, 2025).

### **b. Kebijakan Pelestarian dari Pemerintah dan Masyarakat**

Pelestarian situs-situs bersejarah seperti Keraton Kartasura menjadi salah satu prioritas penting untuk menjaga nilai-nilai sejarah dan identitas budaya lokal. Pada 28 April 2022, Bupati Sukoharjo mengukuhkan keberadaan Benteng Kartasura sebagai Situs Cagar Budaya Kabupaten melalui Keputusan Nomor 646/270 Tahun 2022. Lalu mengusulkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Provinsi Jawa Tengah agar situs Keraton Kartasura di jadikan situs cagar budaya provinsi Jawa Tengah. Atas pengkajian dan pendataan akhirnya usulan itu terealisasi pada tanggal 26 Maret 2024 dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/29 Tahun 2024 situs Keraton Kartasura di tetapkan sebagai situs cagar budaya Provinsi Jawa Tengah (Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 646/270 Tahun 2022 mengenai penetapan Situs Benteng Keraton Kartasura sebagai Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo, ditetapkan pada 28 April 2022)

Dalam rangka mengembangkan fungsi sosial dan budaya Keraton Kartasura, para pengelola menjalin kerja sama aktif dengan masyarakat sekitar, terutama warga lokal yang tergabung dalam sebuah komunitas bernama PAWARTOS (Paguyuban Warga Ageng Kartosuro). Paguyuban ini berfokus pada kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan di kawasan Kartasura. Selain itu, sejumlah tokoh agama juga rutin memanfaatkan area keraton untuk kegiatan keagamaan seperti majelis dzikir dan pembacaan sholawat. Kegiatan budaya lainnya yang digagas oleh pengurus keraton mencakup tradisi sadranan menjelang bulan Ramadan.

Bangunan masjid yang berada di dalam kompleks keraton pun masih aktif digunakan, baik untuk kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), salat Jumat, maupun salat tarawih selama bulan Ramadan. Kedepan, pengelola Keraton Kartasura berencana menggandeng berbagai pihak eksternal, termasuk seniman dan komunitas budaya, untuk menyemarakkan kawasan keraton melalui penyelenggaraan pertunjukan seni tradisional seperti tari klasik Jawa, karawitan, serta pelatihan budaya lainnya. Harapannya, dengan langkah ini keraton bisa kembali ramai dan menjadi tempat yang penting untuk melestarikan budaya serta menjaga warisan sejarah Kartasura di era modern (Lesmana, 2025).

### **c. Tantangan dan Peluang Keraton Kartasura Sebagai Cagar Budaya**

Sebagai salah satu situs bersejarah yang menyimpan nilai penting dalam perjalanan kerajaan Mataram, Petilasan Keraton Kartasura tidak terlepas dari berbagai tantangan dalam upaya pelestariannya. Di sisi lain, keberadaan situs ini juga menyimpan potensi besar yang dapat dikembangkan baik dari aspek budaya, pendidikan, maupun pariwisata. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan petilasan Keraton Kartasura meliputi (Ariyani & Nugroho, 2022):

1. Kurangnya keterlibatan aktif dari pemerintah setempat dalam pengelolaan petilasan Keraton Kartasura menyebabkan situs bersejarah ini cenderung terabaikan. Misalnya, alokasi anggaran untuk perawatan dan pengembangan situs masih sangat terbatas, sehingga pemeliharaan fisik bangunan dan lingkungan sekitar tidak optimal. Hal ini berdampak pada degradasi kondisi situs yang seharusnya menjadi aset budaya penting bagi daerah.
2. Masyarakat di sekitar kawasan petilasan Keraton Kartasura belum sepenuhnya memiliki kepedulian terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan situs. Banyak di antara mereka yang kurang memahami nilai sejarah dan budaya petilasan, sehingga sering kali terjadi tindakan seperti membuang sampah sembarangan atau merusak vegetasi di sekitar area tersebut, yang pada akhirnya mempercepat kerusakan lingkungan situs.
3. Generasi muda saat ini cenderung kurang berminat untuk mempelajari atau mengunjungi situs-situs bersejarah seperti petilasan Keraton Kartasura. Ketidakpedulian ini dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan situs di masa depan, karena tanpa perhatian dari generasi penerus, upaya pelestarian dan pengenalan nilai sejarahnya akan sulit terwujud. Faktor seperti minimnya edukasi sejarah yang menarik dan kurangnya promosi yang relevan bagi kalangan muda turut memperparah kondisi ini.
4. Jumlah pengurus atau tenaga yang bertugas mengelola petilasan Keraton Kartasura masih sangat terbatas, Saat ini, pengelolaan situs masih sangat bergantung pada juru kunci makam, yang juga merangkap peran sebagai pemandu bagi pengunjung atau peziarah yang datang ke lokasi bekas keraton. Jika kawasan ini ingin dikembangkan menjadi destinasi wisata di masa depan, kekurangan tenaga pengelola dapat menjadi hambatan serius, karena diperlukan sumber daya

manusia yang memadai untuk mengelola operasional, promosi, dan kegiatan pelestarian agar situs ini dapat berfungsi secara optimal.

Meskipun tantangan pengelolaan tenaga kerja dan keterbatasan lainnya masih dihadapi, petilasan Keraton Mataram Kartasura memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensinya sebagai destinasi wisata budaya, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, diantaranya:

1. Situs Keraton Kartasura menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata sejarah lokal yang mengangkat peristiwa Geger Pecinan (1740-1743). Dengan memanfaatkan nilai sejarah Geger Pecinan, situs ini dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang tidak hanya memperkenalkan narasi perjuangan kolonialisme, tetapi juga memperkaya wawasan pengunjung tentang dinamika sosial dan budaya pada masa itu (Salsabilla & Ramadinata, 2021)
2. Petilasan Keraton Kartasura memiliki sejumlah peninggalan fisik bersejarah, seperti pendopo, Benteng Sri Penganti, dan Masjid Hastana, yang dapat menjadi aset utama dalam pengembangan wisata budaya. Misalnya, pendopo dapat dijadikan lokasi untuk kegiatan budaya, sementara Benteng Sri Penganti dan Masjid Hastana dapat dilengkapi dengan papan informasi atau tur tematik yang menceritakan peran situs dalam peristiwa Geger Pecinan. Dengan pengelolaan yang baik, peninggalan ini dapat menjadi magnet wisata yang memperkuat identitas sejarah local (Ariyani & Nugroho, 2022).
3. Letak petilasan Keraton Kartasura yang strategis, berdekatan dengan jalur utama Solo–Semarang memberikan keunggulan aksesibilitas. Kemudahan akses ini memungkinkan wisatawan, untuk mengunjungi situs tanpa hambatan transportasi yang berarti.
4. Pertunjukan seni tradisional seperti tari atau gamelan dapat diadakan secara rutin untuk menghidupkan suasana situs, sekaligus memberikan pengunjung wawasan tentang kekayaan budaya Jawa. Pelestarian tradisi ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas budaya lokal dan menarik minat wisatawan yang mencari pengalaman budaya yang mendalam.
5. Petilasan Keraton Kartasura dapat menjadi lokasi ideal untuk mengadakan festival budaya tahunan yang mengusung tema Geger Pecinan atau sejarah Mataram. Festival ini bisa mencakup pameran seni tradisional, pertunjukan musik gamelan, tarian Jawa, atau kuliner khas setempat. Kegiatan ini tidak hanya akan menarik wisatawan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat lokal sebagai pelaku seni atau pedagang, sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi komunitas sekitar.

## **Kesimpulan**

Keraton Kartasura merupakan bagian penting dari sejarah Mataram Islam yang memiliki nilai politik, budaya, dan simbolik yang tinggi. Namun, berbagai peristiwa seperti pemberontakan Trunajaya dan Geger Pecinan mengakibatkan keraton ini mengalami kerusakan fisik dan kehilangan legitimasi spiritualnya, yang akhirnya memicu perpindahan pusat kekuasaan ke Surakarta. Dalam perspektif politik identitas dan memori kolektif, Keraton Kartasura cenderung terlupakan dan tidak mendapat ruang yang layak dalam narasi sejarah dominan masyarakat Jawa.

Memori kolektif masyarakat sekitar terhadap keraton ini cenderung lemah dan terbatas pada narasi lisan, bukan pemahaman sejarah yang terstruktur. Upaya pelestarian sudah mulai dilakukan melalui pengakuan sebagai situs cagar budaya, kerja sama masyarakat lokal, serta kegiatan keagamaan dan budaya. Meski demikian, tantangan berupa

kurangnya perhatian pemerintah, minimnya edukasi sejarah, dan terbatasnya sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama.

Dengan strategi yang tepat meliputi pendidikan sejarah lokal, dukungan kebijakan, dan keterlibatan komunitas Keraton Kartasura dapat diposisikan kembali sebagai situs penting dalam sejarah Jawa, bukan hanya sebagai petilasan, tetapi sebagai bagian aktif dari identitas budaya kolektif masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Abdul, R. K., & Sumarlam. (2022). Analisis Wacana Kritis Teks Berita “Penjebolan Tembok Bekas Keraton Kartasura” di solo.tribunnews.com.” *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS)*, Volume 4. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks>
- Agrestiwati, B., & Indrawati, I. (2023). Identifikasi Tampilan Arsitektur Pada Situs Keraton Kartasura Ditinjau dari Aspek Material. *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*. <https://proceedings.ums.ac.id/siar/issue/view/53>
- Ariyani, D. A., & Nugroho, M. S. P. (2022). Analisis Potensi Wisata pada Petilasan Keraton Kartasura sebagai Strategi Pengembangan Wisata Heritage. *Siar III: Seminar Ilmiah Arsitektur*. <https://proceedings.ums.ac.id/siar/issue/view/19>
- Astuti, D. (2023). Politik Identitas dan Krisis Identitas: Mengungkap Realitas Praktek Politik di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(6).
- Devita. (2025, Juni 6). Anak Muda diselenggarakan Keraton Kartasura.
- Gritantin, L. A. L. (2024). Sejarah Strategi Perluasan Wilayah Praja Mangkunegaran I & II. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol.3(No.7). <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH>
- Khoirunisa, N., Azizah, N., Kusuma, V. A., & Falaq, Y. (2024). Identitas Suku Jawa. *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, Vol.14(No.2).
- Koesninda, S. and A. F. P. (2020). *Revitalisasi Kawasan Keraton Kartasura Berbasis Wisata Kreatif*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lazuardi, M. F., & Sunjayadi, R. A. (2025). Road from Surakarta to Yogyakarta: History of Solo-Yogyakarta Road since 16th until 19th century. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol.13(No.1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/hj.v13i1.10578>
- Lesmana, S. (2025, Juni 6). Juru Kunci Keraton Kartasura.
- Mulia, A. A., & Henny Kustini. (2020). Analisis Pemetaan Potensi Situs Bekas Keraton Mataram Kartasura Untuk Pengembangan Wisata Heritage di Kabupaten Sukoharjo. *Journal of Tourism Destination and Attraction*, Vol.8(No.2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/tourism.v8i2.1654>
- Nasrudin, J. (2018). Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1(No. 1).
- Puspitaningrum, D. (2022). Konvergensi Media dan Memori Kolektif Masyarakat Indonesia. *JIB: Jurnal Inovasi dan Penelitian*, 2(11).
- Puspitasari, A. Della. (2025). Pura Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan Surakarta sebagai Sarana Wisata Edukasi Sejarah. *Abdimas Pariwisata*, Vol. 2(No. 1). <https://doi.org/10.36276/jap.v4i2.505>
- Qurniawati, M. K. Y. A. N. A. Y. R. S. (2024). Perencanaan dan Peningkatan Keuangan Melalui Investasi Digital Syariah pada Masyarakat di Kawasan Cagar Budaya Keraton Kartasura. *Abdi Makarti: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 122–129.
- Rosanawati, I. M. R. (2020). Konflik Internal dan Perpindahan Kraton Kartasura ke Sala. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 2(1), 7.

- Salsabilla, D., & Ramadinata, M. L. (2021). Potensi Wisata Sejarah Peristiwa Geger Pecinan di Kartasura Melalui Situs Kerator Kartasura di Era Revolusi Industri 4.0. In *Prosiding Pekan Sejarah (Urgensi Kesadaran Sejarah dan Pelestarian Budaya Daerah di Era Revolusi Industri 4.0)* (hal. 107–114). Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- Sukris. (2025, Juni 6). Warga Masyarakat.
- Wahyu, I. D., & Sukirno. (2025). Memori Kolektif Konflik Di Aceh Dalam Novel Kawi Matin Di Negeri Anjing Karya Arafat Nur. *Aksara: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 9(No. 1). <https://doi.org/10.33087/aksara.v9i1.1010>